

PENYAJIAN DATA

1. Background Kultural/Profil Bambang Dwi Hartono

Bambang Dwi Hartono merupakan tokoh sentral dalam pemerintahan kota Surabaya periode 2002-2005 dan 2005-2010. Tetapi di balik itu semua ternyata Bambang D. H. merupakan sosok yang lahir bukan dari bumi Surabaya. Bambang D. H. lahir di Tegalombo (Pacitan), 24 Juli 1961. Masa kecil di daerah Tegalombo hanya dihabiskan menjelang kelas 1 sekolah dasar sebelum hijrah ke kota Surabaya mengikuti orang tuanya. Alasan Bambang kecil hijrah ke kota Surabaya karena mengikuti orang tuanya yang notabena merupakan guru SD. Ayah dari Bambang D. H. mempunyai pengalaman ketika sekolah harus *ngenger* (mondok) di rumah orang tua dari ibu Bambang D. H. di daerah Tegalombo. Sementara itu, bapak dari Bambang D. H. mempunyai obsesi atau cita-cita untuk membuat anaknya menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi dan tidak sampai merasakan *ngenger*.

Bambang D. H. juga menjelaskan tentang bagaimana besarnya cita-cita bapaknya untuk anak-anaknya guna memiliki pendidikan yang lebih tinggi:

. . . Kemudian bapak ini *kan* mempunyai obsesi/cita-cita, kalau bisa nanti anaknya sampai perguruan tinggi itu jangan sampai *mondok*. Karena apa, sebebas-bebasnya orang di tempat orang itu lebih bebas di rumah sendiri walaupun jelek. Itu prinsip orang tua

saya/bapak saya. Yang kedua, kalau bapaknya lulusan SMP, SMA ya anak harus sampai perguruan tinggi. Itu cita-cita orang tua saya¹.

Dari alasan orang tua tersebut, Bambang D. H. sampai merasa kagum sehingga tiba pada kesimpulan bahwa bapaknya ingin anaknya lebih daripada bapaknya sendiri, kemudian bagaimana bapaknya mengajarkan tentang kemandirian hidup tanpa ikut orang lain. Setelah hijrah ke Surabaya, Bambang kecil pertama kali menginjakkan kaki di Kota Surabaya dan tinggal di jalan Girilaya gang VI no. 28, sebelum pindah di tahun kedua di daerah Simo Magerejo gang II no. 5. Dan rumah yang berada di daerah Simo Magerejo yang menurut Bambang merupakan rumah perjuangan, hingga kini masih ditempati oleh Ibunda Bambang D. H.

b. Pendidikan Bambang Dwi Hartono

Masa pendidikan Bambang Dwi Hartono dihabiskan hampir seluruhnya di Kota Surabaya. Mulai dari pendidikan dasar (SD) sampai selesai masa sarjana strata 1. Masa pendidikan dasar Bambang kecil ditempuh di SD Komparasi Pembangunan selama delapan tahun. Karena pada masa itu, kelas I-V dianggap sebagai jenjang sekolah dasar sementara kelas VI-VIII dianggap sebagai jenjang menengah (SMP). Kemudian Bambang D. H. melanjutkan sekolah ke PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan) di bawah IKIP Surabaya di Widodaren selama tiga tahun. Setelah lulus dari jenjang pendidikan PPSP, Bambang D. H. melanjutkan studi sarjana strata 1 dengan kuliah di IKIP Negeri Surabaya Jurusan Matematika. Setelah lulus pendidikan S1, Bambang D.

¹ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.25 wib.

Sebetulnya saya lama *nggak* aktif, kemudian saya terpenggil ketika tekanan Orde Baru pada rakyat semakin besar. Ada unjuk rasa buruh ditekan, represif sekali *kan*? Termasuk kematian Marsinah waktu itu. Ada unjuk rasa warga menuntut tanahnya di Kedung Ombo, seperti itu. Kemudian di waktu Unipa ada korban itu. Artinya saya pandang pemerintah sangat represif. Dan sebelumnya ada kasus petrus ya, bagaimana warga negara yang kemudian ditengarai sebagai penjahat ini kok tidak dilihat akar persoalannya yaitu kemiskinan, tapi kemudian dibasmi dengan petrus (penembakan misterius) waktu itu. Saya terus terang tergelitik. Ini akar persoalannya kemiskinan, jangan melalui pendekatan represif seperti itu. Dan terbukti bahwa penembakan misterius itu tidak menyelesaikan kriminalitas yang tinggi. Iya *kan*? *Ndak* selesai. Dulu mungkin pemerintah waktu itu menganggap bahwa dengan penembakan misterius ini kejahatan akan dapat dibasmi. *Nggak* semelama kemiskinan, kebodohan ini tidak akan selesai itu. Itu pendapat saya. Sehingga saya terlibat untuk melakukan perlawanan⁴.

Hal inilah yang terangkum dalam penjelasan Bambang D. H. dalam mengawal aksi-aksi pergerakan secara total:

⁴ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.28 wib.

⁵ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.32 wib.

3. Afiliasi Politik

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya era Reformasi, seakan muncul dengan wajah yang berbeda. Hal ini dikarenakan pada tahun 1999, Bambang menerima tawaran untuk bergabung dan aktif dalam partai politik. Hal ini terjadi setelah Bambang *ditantang* oleh pak Tjip (Sutjipto) yang notabene merupakan salah satu petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI), untuk memperbaiki Republik ini dengan tidak setengah-setengah, tetapi bagaimana untuk masuk dalam sistem pemerintahan kemudian ambil bagian dalam memperbaiki kondisi Republik ini. Akhirnya Bambang D. H. setuju dan masuk untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)⁶.

Setelah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia, Bambang D. H. maju sebagai wakil walikota dengan berpasangan dengan Sunarto Sumoprawiro. Fenomena ini sempat mengagetkan banyak pihak karena perbedaan latar belakang dan kultur dari pasangan calon walikota dan wakil walikota tersebut. Sunarto yang mempunyai latar belakang sebagai TNI-AD berpasangan dengan Bambang yang merupakan sosok aktivis pergerakan Orde Baru.

Hal ini menimbulkan tanda tanya tentang inkonsistensi Bambang sebagai mantan seorang aktivis yang selalu meneriakkan pencabutan dwifungsi ABRI:

⁶ Data diolah dari hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada tanggal 22 Nopember 2011.

Waktu itu pertama kali saya gabung, saya dicaci maki di media itu. Awal tahun 2000-an, pertama kali saya mau menjadi wakilnya pak Narto. Kenapa? Karena pak Narto itu Kopassus Angkatan Darat, sedangkan pemerintahan dulu *kan* Angkatan Darat. Dan saya ketika memimpin demo, isu yang saya angkat apa, “cabut dwi fungsi ABRI, cabut lima paket undang-undang politik.” Kemudian dikira saya *ndak* konsisten *kan*? Tapi Alhamdulillah kemudian masyarakat bisa menerima dan akhirnya dwi fungsi ABRI itu dicabut. Ini kita babak belur dulu waktu demo, ancaman diculik dan sebagainya⁷.

Saat terjadi masa transisi pemerintahan kota Surabaya, Bambang secara otomatis menggantikan posisi Sunarto Sumoprawiro yang meninggal pada tahun 2002. Ketika menjadi pejabat kota dalam hal ini walikota, Bambang D. H. tidak hanya memfokuskan perhatian afiliasi politiknya terhadap partainya tetapi juga membuat keseimbangan dalam pemerintahannya. Bambang menjelaskan bahwa dalam partainya yang kini telah berevolusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memiliki komunikasi tiga pilar. Kalau di tingkat kota, partainya disebut sebagai cabang PDI-P Surabaya. Cabang memiliki petugas partai di legislatif namanya Fraksi PDI-P, kemudian di tingkat eksekutif memiliki petugas partai yang kebetulan menjabat sebagai walikota, yaitu Bambang Dwi Hartono. Partai PDI-P selalu rutin dalam melakukan komunikasi rapat tiga pilar, yang di dalam rapat tiga pilar tersebut pengendalinya adalah cabang, karena induk organisasi PDI-P di tingkat kota adalah cabang. Induk organisasi atau cabang inilah yang kemudian menangkap aspirasi masyarakat dan mengartikulasikan lewat fraksi yang ada. Setelah itu, ada sebuah sinergi dari walikota yang berasal dari PDI-P

⁷ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.36 wib.

dalam menanggapi aspirasi masyarakat kota. Jadi, bentuk komunikasi politik seperti inilah yang dilakukan anggota dewan dalam melaksanakan kontrol dan membuat kebijakan masyarakat untuk diwujudkan oleh walikota. Konsep itulah yang merupakan sistem dari partai PDI-P kota Surabaya⁸.

Dalam melihat konsep afiliasi politik Bambang D. H. baik di tubuh Parpol maupun Pemerintahan, terdapat sebuah indikasi keseimbangan arus kepentingan politik yang telah dilakukan Bambang D. H. mengingat kapasitasnya sebagai walikota. Hal ini patut dan harus untuk dilakukan oleh seorang pemimpin pemerintahan agar tidak terjadi ketimpangan kepemimpinan. Hal ini dapat kita lihat jika seorang pemimpin lebih mementingkan aspirasi Parpol nya, maka yang terjadi adalah bagaimana seorang pemimpin akan menutup mata dan telinga dengan kompleksitas persoalan yang ada dalam elemen masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah buruknya kinerja dalam memimpin serta adanya mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemimpin pemerintahannya.

4. Konsepsi Pengelolaan Birokrasi

a. Karya Bambang Dwi Hartono

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan, seorang *leader* dituntut untuk mampu membuat suatu kebijakan yang populis bagi masyarakat. Tetapi dinamika politik pemerintahan di negeri ini banyak mengalami sebuah stagnasi aksi atau tindakan nyata bagi masyarakat. Hal ini terlihat

⁸ Data diolah dari hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada tanggal 22 Nopember 2011.

dari bocornya anggaran yang membuat subur praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sehingga banyak terjadi penyelewengan anggaran yang sejatinya buat masyarakat, tetapi masuk ke dalam kantong-kantong para oknum tertentu. Hal ini mengakibatkan macetnya pengelolaan sistem tata kota, tidak lancarnya sambungan air bersih ke warga, sulitnya membuat gratis biaya kesehatan bagi masyarakat miskin, dan sebagainya.

Hal seperti inilah yang dijalankan oleh Bambang D. H. saat menjabat sebagai kepala pemerintahan kota Surabaya, dengan mencoba untuk menekan kebocoran anggaran yang terjadi di lingkaran pemerintahan kota Surabaya:

Saya *kan* melakukan terkait dengan KKN yah. Dimana sih kebocoran uang Negara itu terjadi? Di pengadaan barang dan jasa. Secara nasional begitu. Kalau kita bicara pencurian kejahatan, itu *kan* dua penyebabnya. Satu, kesempatan. Dua, niat. Nah, bagaimana menghilangkan kesempatan itu? Membangun sistem. Saya bangunlah sistem pengadaan barang dan jasa, yang kemudian terakhir dikenal dengan *epokurmen* itu. Sebelum ada Perpres tahun 1980 tahun 2003 ini pemerintah secara nasional melaksanakan, saya sudah melaksanakan. Karena keinginan kuat saya menghilangkan kebocoran, menekan angka kebocoran. Yang kemudian niat. Niat ini *kan* orang, bagaimana kalau dulu pejabat itu urut kacang? Lalu saya tidak lakukan *urut kacang* itu, tapi pakai *fit and proper test*. Tidak hanya cukup masa kerja tapi bagaimana kinerja orang itu. Karena begini harapannya, kalau sistem sudah terbangun dengan baik, artinya celah nyopetnya itu kecil lalu yang punya niat dari pejabatnya itu niat nyopetnya besar ya bisa celah yang kecil itu *jebol*. Tapi kalau celahnya sudah kecil, niatnya nyopet sudah dikurangi mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran uang negara. Dan akhirnya terjadi efisiensi anggaran. Dan tiap tahun terjadi efisiensi anggaran antara 20%-25%. Sehingga saya bisa mengoptimalkan uang yang ada untuk banyak hal⁹.

Selain bentuk kebijakan-kebijakan kota, Bambang D. H. juga berhasil membuat Surabaya menjadi salah satu di antara “*Asian Cities of*

⁹ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.58 wib.

the Future 2009/2010". Hal ini diperoleh setelah diberitakan dalam majalah FDI Magazines, sebuah majalah internasional mengenai investasi. Hal itu terjadi setelah Surabaya menjadi nomor satu untuk kategori *Best Cost Effectiveness*, mengalahkan sejumlah kota besar di Asia, seperti Dongguan dan Shenyang, Kuala Lumpur, serta Manila. Bahkan Jakarta sendiri hanya berada di nomor empat. Kategori tersebut membandingkan pendapatan rata-rata warga dengan pengeluarannya. Artinya, Surabaya merupakan kota paling efektif se-Asia. Fakta tersebut sinergi dengan hasil survei biaya hidup lembaga riset Mercer yang mengungkapkan bahwa Surabaya termasuk kota paling murah. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya termasuk kota termahal ke-21. Lebih mahal biaya hidup di Palembang, Semarang, atau Yogyakarta. Sejumlah indikasi mengenai arah pembangunan yang lebih baik pun muncul. Apalagi, manajerial Pemkot yang dipimpin oleh Bambang berhasil meningkatkan APBD menjadi Rp 4,1 triliun. Dengan anggaran tersebut, Pemkot Surabaya bisa melakukan banyak hal. Surat kabar Jawa Pos membaginya dalam tiga hal: pembangunan fisik, kondisi ekonomi, dan program kesejahteraan¹⁰.

Apresiasi pemerintah kota juga mengarah kepada kualitas lingkungan Kota Surabaya. Hal tersebut telah diakui di tingkat nasional, bahkan internasional. Penghargaan Adipura misalnya, selalu diperoleh Surabaya setiap tahun. Ada juga penghargaan dunia internasional, diantaranya Energy Globe Award pada tahun 2005, Green Apple and

¹⁰ Data diperoleh dari Humas pemerintah kota (Pemkot) Surabaya pada 19 September 2011.

MDGs Award dari Metro TV tahun 2007. Sedangkan tahun 2009 Surabaya memperoleh penghargaan *Best Practice* dari The Dubai International Awards for Best Practice (DIABP) yang bekerja sama dengan United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Melalui program Surabaya Green and Clean, Pemkot Surabaya dinilai berhasil menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sehingga layak mendapat penghargaan tersebut¹¹.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Reformasi Birokrasi

a. Dinamika Politik Kota Surabaya

Dinamika politik nasional bangsa ini seakan mempengaruhi konstalasi politik di tingkat daerah maupun kota. Pergolakan kebangsaan telah mengalami beberapa kali fase mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Era Reformasi. Kita tentu tidak bisa melupakan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, dan meninggalkan berbagai problema dan luka sejarah yang sulit untuk dihapuskan. Masyarakat tentu menginginkan sebuah keadilan dari sosok pemimpin yang memegang tampuk kepemimpinan pemerintahan. Tetapi yang terjadi adalah sebuah tindakan yang represif terhadap warga negara, bentuk tindakan korupsi yang merajalela, tidak adanya unsur hak asasi sebagai warga negara, budaya *patronage*, hingga sikap pemerintah yang bersifat otoriter.

¹¹ *Ibid.*

Bentuk sikap dan tindakan pemerintah tersebut mengakibatkan kekesalan dari masyarakat. Bahkan di dalam lingkaran internal pemerintahan kota Surabaya banyak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Sebagai contoh, pada saat itu banyak pegawai kantor pemerintahan kota Surabaya yang masih ada hubungan saudara, dan bentuk penerimaan pegawai tersebut tidak dilakukan dengan cara *fit and proper test* tetapi dengan jalan kekeluargaan atau biasa kita sebut dengan kolusi. Sementara masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam pemerintahan tidak akan dapat bekerja dalam instansi tersebut meskipun secara kapasitas dan integritas persyaratan telah dipenuhi. Sampai muncul anggapan dari masyarakat Surabaya dengan memelintirkan arti KMS bukan lagi sebagai Kota Madya Surabaya tetapi menjadi *Kumpulan Maling Surabaya*. Itulah potret pada saat itu dan bahkan menjadi *anekdot* bagi masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah praktek-praktek KKN seperti itu tidak hanya terjadi di Surabaya tetapi di seluruh Republik ini¹².

Selain suburnya praktek-praktek KKN di Surabaya, pandangan pemerintah kota Surabaya terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat negatif. Sehingga membuat hubungan antara LSM dan pemerintah kota Surabaya menjadi buruk. Tetapi setelah menjadi walikota, Bambang mencoba membangun komunikasi dengan kawan-kawan LSM. Alasan sederhana dari Bambang terhadap LSM adalah mereka tidak menarik keuntungan, merupakan induk organisasi nirlaba, dan banyak orang-

¹² Data diolah dari hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada tanggal 22 Nopember 2011.

orang yang memang betul-betul berkonsentrasi pada masalah-masalah sosial, misalnya perhatian terhadap korban kekerasan, perdagangan perempuan (*trafficking*), sampai masalah Narkoba. Selain itu, asumsi Bambang adalah karena LSM mempunyai sumber daya manusia yang bagus sementara pemerintah kota memiliki anggaran, akhirnya terjadi bentuk kerjasama antara LSM dan pemerintah kota Surabaya.

Dari bentuk optimalisasi peran dan posisi LSM oleh pemerintah kota Surabaya, masalah-masalah sosial kota Surabaya seakan dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh, kasus *trafficking* yang terjadi di Surabaya. Dalam kasus ini, pemerintah kota Surabaya lewat Badan Pemberdayaan Masyarakat bekerja sama dengan Dinas Sosial LSM yang terkait dengan masalah tersebut. Akhirnya persepsi negatif tentang LSM di kalangan pemerintah kota maupun masyarakat sedikit-sedikit mulai tereduksi dengan sendirinya. Dan hal inilah yang membuat kawan-kawan dari pihak pemerintah kota yang awalnya mempunyai pandangan buruk terhadap LSM, akhirnya merasa terbantu dan nyaman dalam membangun kerjasama tersebut¹³.

b. Pranata Politik Kota Surabaya

Dalam setiap pemerintahan pasti dijalankan oleh sistem yang telah terbangun dan disepakati antara pihak eksekutif dan legislatif. Bangunan sistem yang telah terbangun harus dijaga agar menjadi lebih baik dan desain politik dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, di dalam rencana jangka panjang bagaimana *supra struktur* itu semakin berdaya

¹³ *Ibid.*

dan mandiri. Pada saat masa setelah tumbangnya rezim orde baru, banyak warga negara yang tidak memahami arah reformasi ini. Sehingga, di dalam pemerintahan orde baru itu berbagai organisasi yang ada ingin dikooptasi, termasuk dulu anggota pegawai negeri (Korpri) harus menjadi anggota partai Golkar. Tetapi setelah memasuki masa reformasi, pemerintah mencoba untuk mendorong agar lepas, berdaya dan mandiri dari pemahaman maupun bentuk kooptasi instansi seperti saat orde baru dulu.

Hal tersebut tidaklah mudah, karena masih ada bayang-bayang bentuk pemahaman dan tindakan kooptasi saat orde baru. Sebagai contoh, saat orde baru sosok walikota merupakan penguasa tunggal. Dan kalau bisa walikota merangkap untuk menjadi ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Palang Merah Indonesia (PMI), sampai ketua umum Persebaya. Tetapi di balik itu semua, merangkapnya jabatan walikota menjadi ketua KONI, PMI maupun Persebaya hanyalah merupakan sebuah simbol. Padahal, kalau kita pahami tugas utama dari walikota sangatlah berat dalam memimpin sebuah pemerintahan kota. Baik yang sifatnya administratif maupun politis yaitu peran sebagai pimpinan dari masyarakat kota Surabaya¹⁴.

Berikut ini merupakan petikan wawancara mengenai bentuk pemikiran orde baru tentang kooptasi dari pemerintah kota:

. . . Ada lagi orang membuat pengurus meminta saya untuk mengukuhkan. Karena kebiasaan orde baru *kan* minta walikota buat mengukuhkan supaya bisa dikooptasi atau dikendalikan. Saya malah mendorong mereka untuk tidak mengikatkan diri kepada

¹⁴ *Ibid.*

pemerintah. Sudahlah, sekarang ini bagaimana kalian ini makin berdaya, makin mandiri. Itu sebenarnya *design* pembangunan politik ke depan¹⁵.

Dalam membangun pranata politik kota Surabaya, Bambang terkesan tidak begitu melihat hambatan yang besar. Hal ini dikarenakan karena proses komunikasi yang bagus, dan filosofi dari keberhasilan membangun pranata politik adalah kalau salah harus mau untuk mengakui kesalahan dan jangan pernah takut dan malu untuk meminta maaf, walaupun kita memiliki jabatan yang tinggi. Karena Bambang beranggapan bahwa, pemimpin jangan pernah merasa kredibilitasnya akan turun jika meminta maaf kepada warga. Dan jangan segan-segan seorang pemimpin untuk menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi dari masyarakat luas.

2. Supremasi Hukum

Dinamika politik kota Surabaya membuat Bambang Dwi Hartono untuk aktif bergerak dalam mencari seluk beluk persoalan dan penyelesaian dari berbagai problematika kota ini. Hal ini diakui oleh Bambang dengan mencoba merubah stigma potret buruk wajah pemerintahan kota Surabaya menjadi kota yang baik dan bersih. Sebelumnya, Surabaya dikenal dengan tingginya KKN, adanya *anekdot* tentang KMS, sampai buruknya hubungan pemerintah kota dengan LSM. Berbagai bentuk penyelesaian pun telah dilakukan dengan cara komunikasi, merangkul semua unsur pemerintahan, sampai menegakkan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.53 wib.

aturan-aturan hukum yang berlaku. Tetapi hal tersebut tidaklah mudah karena kultur kota dan masyarakat Surabaya yang serba kompleks.

Posisi sebagai walikota di kota besar sangat dipahami Bambang dengan salah satu cirinya yaitu kultur heterogen dari masyarakatnya. Dengan adanya kultur heterogen tersebut, potensi konflik sangat besar sekali. Konflik tersebut dapat berupa ketegangan antar etnik, antar agama, antar kelas (kaya dan miskin), antar kelompok kepentingan, sampai antar Parpol. Ketika muncul potensi konflik, harus muncul kesadaran dari walikota untuk melakukan sebuah upaya solutif guna membuat stabilitas keamanan kota. Berikut petika wawancara mengenai hal tersebut:

Ketika ada kesadaran bahwa potensi konflik ada, maka walikota saya harus tegas di dalam mengelola kota ini. Di dalam mengelola kota ini selain dipandu dengan undang-undang juga ada peraturan daerah (Perda). Namanya peraturan daerah kan mengatur daerah itu. Nah, Perda itu *kan* begitu dituangkan itu *kan* hasil kesepakatan antara eksekutif (kepala daerah) yang mendapat mandat untuk mengatur kota ini, dan wakil rakyat (DPRD). Sehingga kalau aturan yang mengatur daerah itu atau Perda sudah mengikat kita, maka kita harus tegas. Kalau tidak tegas maka akan terjadi konflik. Dan *ndak* ragu-ragu saya untuk menegakkan aturan itu¹⁶.

Di satu sisi, Bambang D. H. juga pernah menangkap keresahan masyarakat saat memasuki bulan suci Ramadhan mengenai petasan dan praktek prostitusi di lokalisasi. Meskipun belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang hal tersebut, Bambang D. H. membuat terobosan dengan mengeluarkan SK Walikota mengenai penutupan semua lokalisasi selama bulan suci Ramadhan, pembatasan jam buka tempat-tempat hiburan malam, dan larangan dalam memproduksi,

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.34 wib.

mengedarkan dan menggunakan petasan. Bahkan untuk kasus petasan itu, Walikota mengancam dengan Undang-Undang Darurat pada saat itu. Dengan membuat surat keputusan (SK) walikota tersebut, merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi walikota karena hal tersebut baru pertama kali di Indonesia¹⁷.

3. Pelayanan Publik

Membangun sistem dalam pemerintahan kota memang tidak serta merta dilakukan dalam bentuk yang serba cepat. Karena membutuhkan proses dan konsolidasi secara kelembagaan. Selain itu dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin untuk membuat dan menjalankan sistem dengan baik untuk mengelola kota menjadi lebih berkembang. Jika anggaran kebocoran bisa ditekan dan sistem dijalankan dengan baik, yang terjadi adalah pembangunan infrastruktur kota, membangun rumah sakit baru, taman-taman di tengah kota sampai kemudahan masyarakat dalam mengakses air bersih.

Konteks inilah yang telah diaplikasikan dalam tindakan nyata oleh Bambang D. H.:

. . . Yang ekstrem begini, bayangkan kota ini dulu *ndak* bisa membangun stadion, *ndak* bisa membebaskan uang SPP, *ndak* bisa menggratiskan biaya kesehatan, kemudian pasang air minum sulit, kampung-kampung banyak yang rusak. Tetapi, ketika saya kelola kota ini secara simultan, saya bisa bangun gedung rumah sakit baru, sekaligus saya bisa bangun stadion yang bagus, sekaligus kampung-kampung bisa saya paving, sekaligus sambungan air bersih ke warga makin banyak, macem-macem *kan*? Kemudian ada pertanyaan besar! Pertanyaan besarnya begini, dulu duitnya kemana dan sekarang duitnya darimana? Iya *kan* ekstrem *kan*? Itulah adanya efisiensi, fokusnya program dan sebagainya. Iya *kan*?

¹⁷ Data diolah dari hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada tanggal 22 Nopember 2011.

Biyen gak onok, saiki sekolah SD, SMP, SMA wes bebas wes gak mbayar. Buktine yo isok! Ya karena komitmen perjuangan, tidak hanya ngomong pada saat di jalanan tetapi saya wujudkan ketika saya masuk pemerintahan¹⁸.

Di dalam bidang pendidikan, Pemkot Surabaya memiliki sebuah kebanggaan tersendiri. Karena Surabaya berhasil menjalankan amanat Undang-undang dengan membuat anggaran pendidikan sebesar 20%, yang nilainya mencapai 805 Miliar Rupiah. Bahkan, angka ini lebih besar dari rata-rata total APBD kota/kabupaten di Jawa Timur. Dengan jumlah sebanyak itu, Pemkot bisa berbuat banyak. Di tingkat SD, bersama bantuan operasional sekolah (BOS) pusat, setiap siswa SD, baik Negeri maupun Swasta, mendapat subsidi Rp. 62.300 setiap bulannya. Untuk setiap siswa SMP, subsidinya Rp. 118.500 setiap bulan, sedangkan setiap siswa SMA Negeri mendapat subsidi Rp. 152.000 setiap bulan. Pemkot bahkan melakukan terobosan yang lebih jauh dengan menanggung subsidi bagi setiap siswa SMA swasta, SMK negeri, dan SMA swasta sebesar Rp.152.000 setiap bulannya¹⁹.

4. Stabilitas Politik Lokal

a. Konsolidasi Sistem Kelembagaan

Konsolidasi sistem kelembagaan merupakan bentuk proses lanjutan setelah mengalami masa transisi. Proses transisi kepemimpinan pernah dialami Bambang pada saat meninggalnya walikota Sunarto Sumoprawiro. Hal ini seakan membuat Bambang untuk bergerak

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 11.01 wib.

¹⁹ *Ibid.*

melanjutkan dan melaksanakan sistem kelembagaan yang telah dibangun bersama dengan Alm. Sunarto Sumoprawiro. Bentuk bangunan dari konsolidasi sistem kelembagaan harus dibarengi dengan keseimbangan lima arena. Lima arena tersebut meliputi, masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, supremasi hukum, dan aparatus negara. Hal yang pertama dilakukan adalah komunikasi Bambang dengan masyarakat Surabaya mengenai proses pergantian tampuk kepemimpinan dari wakil walikota menjadi walikota. Bambang melakukan komunikasi dengan mengatakan bahwa undang-undang otonomi daerah telah menjelaskan mengenai hal tersebut. Undang-undang tersebut berbunyi, “Kalau walikota/kepala daerah berhalangan tetap maka wakilnya menggantikan sampai habis masa baktinya.

Tetapi bentuk penjelasan tersebut tidaklah cukup membuat anggota di jajaran legislatif untuk mendukung kepemimpinan Bambang Dwi Hartono menjadi walikota Surabaya. Karena setelah satu bulan dilantik, Bambang diberhentikan oleh DPRD Kota Surabaya. Akhirnya kasus tersebut menjadi polemik secara nasional, dengan alasan bahwa sangat mudah sekali untuk menjatuhkan seorang kepala daerah. Kejadian ini seakan membuat anggota legislatif begitu superior dalam mengambil kebijakan. Kalau kita lihat ke belakang pada saat orde baru, eksekutif memiliki peran yang sangat dominan. Jadi, Soeharto sebagai pimpinan eksekutif pemerintahan bisa mengendalikan lembaga legislatif dan yudikatif. Berbagai instrumen pemerintahan di negeri ini seakan-akan berada di bawah kontrol Presiden Soeharto. Tetapi, begitu reformasi

bergulir di negeri ini, keseimbangan politik di rezim orde baru tidak ada, maka dibuatlah regulasi yang kira-kira ada *balancing*. Tetapi yang terjadi setelah adanya undang-undang otonomi daerah bukanlah sebuah *balancing* tetapi lebih merupakan bentuk dominasi dari lembaga legislatif, dan salah satu korban pertama adalah Bambang saat pertama kali menjabat sebagai walikota²⁰.

Dan kejadian diungkapkan Bambang Dwi Hartono dalam petikan wawancaranya:

Saya baru dilantik satu bulan dan belum bekerja tetapi sudah dijatuhkan. Betapa undang-undang otonomi daerah ini tidak memberikan *balancing* atau keseimbangan antara infrastruktur-infrastruktur itu. Apa yang terjadi, akhirnya dirubahlah undang-undang otonomi daerah yang sekarang kita jadikan rujukan. Dimana esensi perubahannya? Esensi perubahannya yaitu keseimbangannya. Jadi sekarang dewan itu tidak bisa dengan mudah menjatuhkan walikota²¹.

Setelah adanya undang-undang otonomi daerah yang baru, Bambang mulai melakukan konsolidasi sistem kelembagaan internal pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan tepat waktunya pembahasan tentang APBD mulai tahun 2005-2010. Alasan mendasar yang dikemukakan oleh Bambang adalah bentuk komunikasi yang proporsional dengan anggota dewan, tidak adanya bentuk penekanan yang dilakukan Bambang kepada anggota dewan ataupun sebaliknya. Hal tersebut dilakukan Bambang karena adanya pemahaman yang sama terhadap instrumen yang berupa undang-undang.

²⁰ Data diolah dari hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada tanggal 22 Nopember 2011

²¹ Hasil wawancara dengan Bambang Dwi Hartono pada 22 Nopember 2011 pukul 10.57 wib.

Bambang juga melakukan bentuk konsolidasi sistem kelembagaan eksternal pemerintahan, seperti Organisasi masyarakat, Organisasi kepemudaan (OKP), dan Partai politik di Surabaya. Kunci dari konsolidasi sistem kelembagaan eksternal dilakukan oleh Bambang dengan jalan komunikasi, artinya bagaimana seorang pimpinan daerah sebagai pejabat politik mampu melakukan komunikasi politik yang baik. Sehingga dapat terwujud keseimbangan dan sinergitas dalam membangun kota Surabaya.

Bentuk komunikasi politik secara kelembagaan inilah yang coba dijelaskan oleh Achmad Syaiful Chalim (Ketua PCNU 2005-2010):

Secara garis besar komunikasi yang dilakukan pak Bambang cukup bagus. Dan saya pikir pak Bambang cukup bisa melakukan sesuatu yang itu untuk kepentingan NU. Hubungan NU secara kelembagaan maupun secara pribadi dengan pak Bambang cukup bagus, dan menurut saya sikap beliau dalam merangkul semua kalangan tanpa tebang pilih benar-benar dijalankan²².

Senada dengan Ormas, Kemas Eka Saktiawan (Wakil Ketua I KNPI Surabaya) juga menjelaskan bentuk komunikasi politik Bambang secara kelembagaan terhadap OKP:

Bentuk kepemimpinan mas Bambang bagus sekali, karena saya melihat gaya kepemimpinan mas Bambang tidak elitis, tidak mengkotak-kotakkan dan tidak hanya mau bertemu dengan kalangan-kalangan yang di atas, kalangan masyarakat bawah pun beliau sangat peduli. Dengan OKP yang tidak bersifat partisan atau yang berafiliasi kepada politik, beliau sangat bagus. Kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam bentuk hibah-hibah daerah ataupun bantuan-bantuan yang direkomendasikan oleh walikota untuk didukung kegiatan penyelenggaraan organisasi kepemudaan, beliau selalu memberikan perhatian. Dan melalui dua dinas yang dipimpin oleh beliau, yang bertugas untuk pembinaan generasi muda itu ada dua, yang pertama yaitu Bankesbang, untuk membina Ormas maupun OKP yang mengadakan kegiatan-kegiatan bersifat

²² Hasil wawancara dengan Achmad Saiful Chalim pada 30 Nopember pukul 17.15 wib.

politis seperti Musyda, Kongres, Rakerda dan sebagainya. Kedua, Dinas pemuda dan olah raga, untuk pengembangan minat bakat, pengembangan intelektual, dan sebagainya. Dengan kedua dinas tersebut mas Bambang selalu memberikan dukungan dan bantuan-bantuan konsolidasi organisasi²³.

b. Strategi Dalam Membangun Stabilisasi Kota Surabaya

Di dalam membangun dinamika politik kota Surabaya menjadi stabil, Bambang juga menjelaskan mengenai strategi yang dibangun untuk membuat stabilisasi politik yang dapat berdiri di semua pihak. Bambang mencoba untuk merangkul semua kekuatan-kekuatan yang ada di kota Surabaya seperti organisasi kepemudaan (OKP), organisasi masyarakat (Ormas) dan partai politik di Surabaya serta memposisikan mereka pada posisi sebenarnya. Di samping itu, menjadi pemimpin juga harus pro aktif terhadap kompleksitas permasalahan di masyarakat. Maksudnya, ketika ada sinyal persoalan, pemimpin jangan pernah menunggu desakan dari masyarakat. Hal lain yang coba dilakukan adalah dengan menata bangunan komunikasi guna membangun stabilisasi politik kota. Selain itu, Bambang melakukan optimalisasi pertemanan dengan berbagai kalangan untuk membuat stabilitas politik Surabaya. Misalnya, Bambang mencontohkan posisinya untuk terus melakukan komunikasi dengan lawan politik meskipun berbeda ideologi dan *platform* guna memupuk pertemanan dan menghilangkan ego benci dan dendam pribadi yang tidak berdasar. Pertemanan pun dijalin oleh Bambang dengan kalangan umat dari berbagai agama, karena Bambang menyadari bahwa negeri ini dibangun dengan keragaman yang ada.

²³ Hasil wawancara dengan Kemas Eka Saktiawan pada 25 Nopember 2011 pukul 15.48 wib.

Hal ini juga diamini oleh Kemas Eka Saktiawan yang merupakan wakil ketua I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Surabaya pada saat Bambang Dwi Hartono menjabat walikota:

Mas Bambang ini memiliki bakat kepemimpinan yang sisi pengayomannya menonjol. Dalam arti, walaupun beliau tampil dengan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi sifat kenegarawanannya beliau itu selalu mengakomodir kepentingan-kepentingan di luar PDI-P. Contohnya, dengan kalangan NU, Muhammadiyah, OKP yang tidak bersifat partisan atau yang berafiliasi kepada politik sangat bagus²⁴.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kemas Eka Saktiawan pada 25 Nopember 2011 pukul 15.45 wib.